
Perspektif Ekologi Administrasi: Sebuah Tinjauan terhadap Ekologi Administrasi Holistik, Kontemporer dan Konstektual karya Dr. Sahya Anggara, M.Si.

Anisa Relianti¹, Sahlaa Yusriah², Edi Setiawan³

¹²³Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received April 12, 2025

Revised Mei 20, 2025

Accepted Juni 16, 2025

Keywords:

Administrative Ecology

Contemporary Bureaucracy

Public Service

Local Wisdom

ABSTRACT

This study sees administrative ecology as a contextual and holistic approach to improving the efficiency of government bureaucracy amidst the political, economic, and socio-cultural dynamics of its environment. To provide accommodating public services, the administrative ecology model seeks to bring the epicenter of the bureaucracy closer to the community. This is done based on utilitarianism theory. To find new indicators relevant to current problems, ecological factors, both internal and external, such as local wisdom and organizational culture, are thoroughly studied. The author emphasizes the importance of administrative knowledge as a tool to achieve organizational goals through collaboration between administration and the environment. In addition, this approach incorporates concepts such as interdependence, change, and evolution. The aim of this approach is to build governance based on local values and sustainability. This perspective suggests that the research makes a significant contribution to the establishment of an administrative ecology development strategy that is appropriate for the Indonesian situation. To ensure that this method is effective in building an administrative system that meets the needs of society, further empirical testing is required. This study hopes to help academics, practitioners, and policymakers improve the quality of public services in a sustainable manner.



Copyright © 2025 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Anisa Relianti,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas April
Jln. Angkrek Situ No 19 Kelurahan Situ - Sumedang.
Email: anisarelianti@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Administrasi publik adalah salah satu pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang berfungsi untuk menjamin bahwa kebijakan publik dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilaksanakan dengan lancar. Fokus modern administrasi publik bukan hanya kinerja dan efektivitas; hubungan antara birokrasi dan lingkungan sosial-ekologis juga penting. Ini ditunjukkan oleh paradigma baru yang menekankan betapa pentingnya mengintegrasikan elemen ekologi ke dalam administrasi publik. Paradigma ini masih relevan karena tantangan global seperti urbanisasi yang semakin cepat, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim. Pendekatan holistik memberikan perspektif yang menyeluruh terhadap administrasi negara, dengan mempertimbangkan berbagai elemen yang saling berinteraksi dalam ekosistem pemerintahan. Sementara itu, pendekatan kontemporer menyoroti perlunya pemutakhiran teori-teori tradisional untuk merespons perubahan zaman, seperti integrasi teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan dan meningkatnya kompleksitas masalah lintas sektor. Di sisi lain, pendekatan kontekstual menegaskan pentingnya menyesuaikan kebijakan dan praktik administrasi dengan konteks lokal yang spesifik, terutama di tengah keberagaman budaya, sistem politik, dan kebutuhan masyarakat yang unik di setiap wilayah.

Karya Dr. Sahya Anggara, M.Si. hadir untuk memberikan tinjauan komprehensif terhadap konsep ekologi administrasi dengan memperluas kerangka teoritis dan aplikatif yang ada. Dalam bukunya, ia mengurai bagaimana pendekatan holistik, kontemporer, dan kontekstual dapat diterapkan secara sinergis dalam administrasi negara. Kajian ini tidak hanya memberikan pemahaman baru terhadap ekologi administrasi, tetapi juga menjawab tantangan praktis yang dihadapi oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di tengah tantangan global dan lokal. Dalam hal pelayanan publik, administrasi publik memainkan peran penting dalam menjamin bahwa pemerintahan berjalan dengan baik dan efisien. Namun, kompleksitas dinamika sosial, politik, budaya, dan lingkungan saat ini telah menimbulkan tantangan baru bagi sistem birokrasi tradisional. Untuk menangani tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan menyeluruh. Salah satu pendekatan yang relevan adalah model ekologis dalam administrasi publik. Pendekatan ini menawarkan cara baru untuk memahami dan mengendalikan hubungan antara sistem administrasi dan lingkungan sekitarnya.

Menurut pendekatan ekologis, administrasi publik tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik secara fisik, sosial, maupun budaya. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana birokrasi dan lingkungan berinteraksi satu sama lain untuk menciptakan sistem yang lebih responsif, relevan, dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ekologis menawarkan solusi potensial untuk masalah birokrasi yang selama ini dianggap tidak efektif, kaku, dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini sangat penting karena keanekaragaman budaya dan sosial yang ada di Indonesia, yang membutuhkan pendekatan administrasi publik berbasis lokal. Dengan mempertimbangkan kondisi lokal, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Selain itu, pendekatan ini mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif. Pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara berbagai elemen dalam ekosistem birokrasi dapat memperkuat efektivitas pelayanan publik. Dalam jangka panjang, penerapan prinsip-prinsip ekologis dalam administrasi publik dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan efektivitas, tetapi juga pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga ditekankan, sehingga tercipta ekosistem yang saling mendukung. Melalui integrasi nilai-nilai ekologis dalam administrasi, diharapkan dapat muncul model-model baru yang lebih adaptif dan inovatif dalam menghadapi tantangan masa depan.

Dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh digitalisasi dan globalisasi, pendekatan ekologis juga relevan. Dalam administrasi publik, pendekatan ekologis dapat diterapkan melalui penggunaan teknologi informasi seperti e-Government. Teknologi dapat membantu pemerintah menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebaliknya, teknologi memungkinkan birokrasi untuk menanggapi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik melalui sistem yang lebih terbuka dan berinteraksi.

Salah satu alasan pentingnya penerapan model ekologis dalam administrasi publik adalah karena pendekatan ini mendorong birokrasi untuk menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya, dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan karakteristik lokal. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip pendekatan ekologis yang mengakui pentingnya pluralitas dan dinamika lokal dalam proses administrasi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam sistem birokrasi, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan relevansi kebijakan publik. Pendekatan ini juga memungkinkan pemerintah untuk lebih responsif terhadap isu-isu spesifik yang dihadapi oleh masyarakat setempat, seperti masalah sosial, ekonomi, dan

lingkungan. Sebagai contoh, dengan memahami kondisi geografis dan budaya daerah, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif. Selain itu, penerapan model ekologis mendorong kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, untuk bersama-sama mencari solusi yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan yang diambil, tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap proses administrasi. Model ekologis berkontribusi pada terciptanya sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Namun, meskipun pendekatan ekologis menawarkan potensi besar, penerapannya tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari struktur birokrasi tradisional yang cenderung hierarkis dan kaku. Struktur semacam ini sering kali tidak fleksibel dalam mengakomodasi dinamika lingkungan dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendekatan ekologis di kalangan birokrat juga menjadi kendala dalam implementasi model ini secara efektif. Untuk itu, diperlukan reformasi birokrasi yang tidak hanya berfokus pada perubahan struktural, tetapi juga perubahan budaya organisasi dan pola pikir para birokrat.

Hubungan antara lingkungan fisik dan kebijakan publik adalah bagian dari ekologi administrasi publik. Ini mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya juga. Misalnya, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan membutuhkan pendekatan yang mempertimbangkan dampak lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian budaya lokal. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan pendekatan ekologis dalam administrasi publik dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, memasukkan prinsip-prinsip ekologi ke dalam administrasi publik adalah kebutuhan yang tidak hanya dipelajari di universitas tetapi juga di dunia nyata untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Namun, dalam kehidupan nyata, menerapkan pendekatan ekologis dalam administrasi publik menghadapi sejumlah masalah. Ini termasuk resistensi birokrasi, kekurangan sumber daya, dan konflik kepentingan antara berbagai pihak yang terlibat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penolakan perubahan sering terjadi karena tidak memahami manfaat jangka panjang dari pendekatan ekologis. Selain itu, birokrasi sering terjebak dalam strategi jangka pendek yang hanya mengejar tujuan administratif tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan. Akibatnya, untuk memasukkan prinsip-prinsip ekologi ke dalam administrasi publik, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan partisipatif. Sementara sejumlah besar penelitian telah dilakukan secara global tentang ekologi administrasi publik, jumlah penelitian tersebut masih terbatas pada masalah lokal. Penelitian tentang hubungan antara administrasi publik dan ekologi di Indonesia masih sangat baru dan biasanya berkonsentrasi pada bidang tertentu, seperti pengelolaan sumber daya alam dan penanganan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai konsep, teori, dan praktik yang berkaitan dengan ekologi administrasi publik. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana pendekatan ekologis membantu meningkatkan kualitas administrasi publik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini akan menemukan tantangan dan peluang untuk memasukkan prinsip ekologi ke dalam sistem birokrasi.

Dalam artikel ini akan menjelaskan dan memberikan pandangan komprehensif tentang ekologi administrasi dalam kerangka yang lebih luas. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pendekatan holistik, kontemporer, dan kontekstual dapat diterapkan dalam administrasi negara, khususnya dalam menghadapi dinamika global dan tantangan lokal. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi negara, baik secara teoretis maupun praktis, dengan menawarkan solusi yang relevan terhadap kompleksitas administrasi di era modern. Kajian ini tidak hanya memberikan perspektif teoritis yang mendalam, tetapi juga menyajikan berbagai aplikasi praktis yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk pengembangan kebijakan publik yang lebih adaptif. Dengan memadukan pendekatan holistik untuk melihat gambaran besar, pendekatan kontemporer untuk mengikuti perkembangan terkini, dan pendekatan kontekstual untuk menyesuaikan dengan karakteristik lokal, artikel ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjawab berbagai permasalahan administrasi negara yang semakin kompleks di era modern.

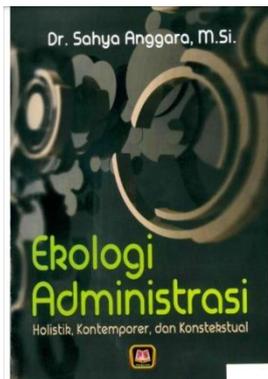
Dengan demikian, penelitian ini berkonsentrasi pada beberapa pertanyaan utama:

- a) Bagaimana metode ekologis dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas birokrasi Indonesia?
- b) Sampai titik mana kearifan lokal dapat dimasukkan ke dalam model ekologi pemerintahan publik?
- c) Dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan publik, apa indikator yang menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan ekologis berhasil?

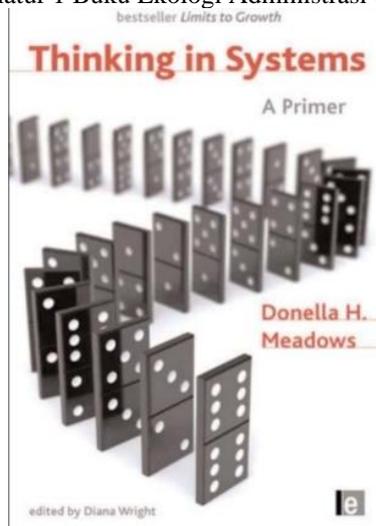
2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode studi literatur yang bertujuan untuk mengeksplorasi konsep ekologi administrasi dalam rangka meningkatkan efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Dalam pendekatan ini, dilakukan identifikasi, analisis, dan interpretasi terhadap berbagai sumber literatur ilmiah, termasuk buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang relevan. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti terbit dalam lima tahun terakhir, relevansi dengan teori ekologi administrasi, serta keberadaan data empiris atau kajian konseptual yang sesuai dengan konteks Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan keberagaman perspektif dalam literatur yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana ekologi administrasi dapat diterapkan dalam praktik birokrasi, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya

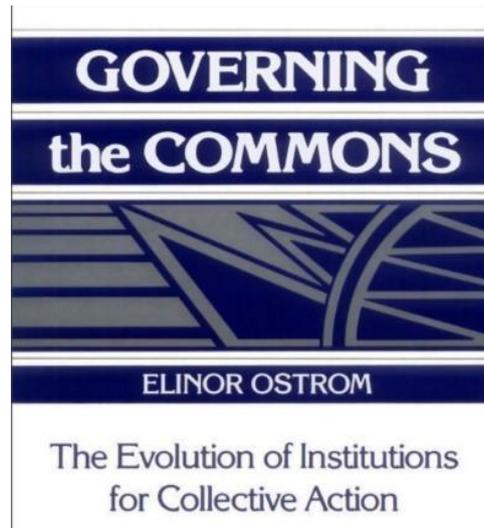
Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik pengkodean untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan hubungan antarvariabel yang terdapat dalam literatur. Hasil analisis kemudian disintesis untuk mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber, sehingga menciptakan pemahaman yang menyeluruh. Validitas data dijamin dengan hanya mengandalkan literatur yang telah melalui proses peer-review dan diterbitkan oleh lembaga akademik yang terpercaya. Selain itu, triangulasi data dilakukan untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang diperoleh. Meskipun metode ini terbatas pada analisis data sekunder tanpa melakukan pengumpulan data primer, pendekatan studi literatur ini tetap penting untuk merumuskan kerangka teoritis yang dapat diuji secara empiris di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan wawasan baru yang dapat diterapkan dalam pengembangan kebijakan publik dan praktik administrasi yang lebih baik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong diskusi lebih lanjut di kalangan akademisi dan praktisi tentang pentingnya ekologi administrasi dalam konteks birokrasi modern. Temuan yang dihasilkan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi hubungan antara teori dan praktik dalam administrasi publik.



Gambar 1. Litelatur 1 Buku Ekologi Administrasi (Anggara S, 2018)



Gambar 2. Litelatur 2 Buku Thinking in Systems (Meadows, 2009)



Gambar 3. Litelatur 3 Buku Governing the Commons (Ostrom, 1990)



Gambar 4. Litelatur 4 Artikel Sustainability Transitions (Loorbach et al., 2017)

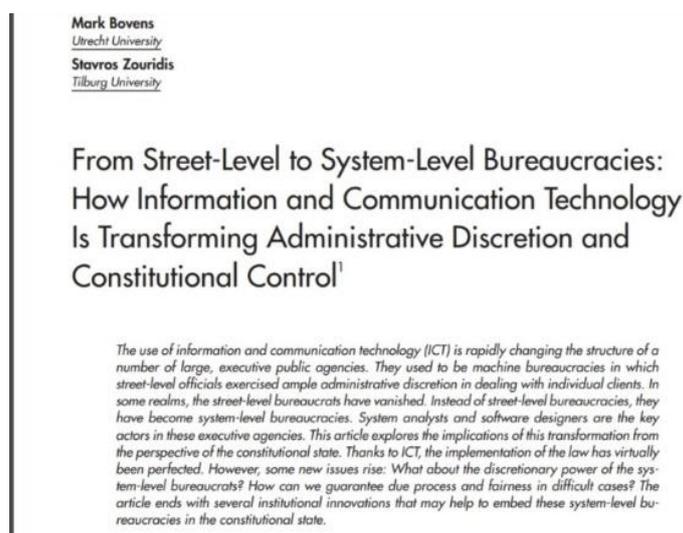
**Dampak Pembangunan Sektoral terhadap
Konversi dan Degradasi Hutan Alam:
Kasus Pembangunan HTI dan Perkebunan
di Indonesia**

Hariadi Kartodihardjo dan Agus Supriono

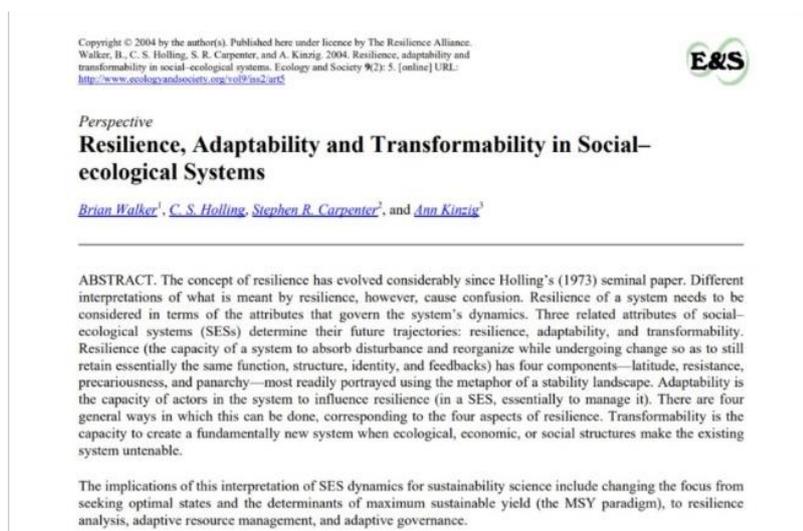
CENTER FOR INTERNATIONAL FORESTRY RESEARCH
Office address: Jalan CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16680, Indonesia
Mailing address: P.O. Box 6596 JKPWB, Jakarta 10065, Indonesia
Tel.: +62 (251) 622622; Fax: +62 (251) 622100
E-mail: cifor@cgiar.org
Website: <http://www.cgiar.org/cifor>

Gambar 5. Litelatur 5 Artikel Dampak Pembangunan Sektoral (Kartodihardjo & Supriono, 2000)

- 6 Relianti, Yusriah, Setiawan,
Perspektif Ekologi Administrasi: Sebuah Tinjauan terhadap Ekologi Administrasi Holistik,
Kontemporer dan Konstektual karya Dr. Sahya Anggara, M.Si.



Gambar 6. Litelatur 6 Artikel From Street-Level (Bovens & Zouridis, 2002)



Gambar 7. Litelatur 7 Artikel Resilience, Adaptability (Walker et al., 2004)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Analisis Ekologi Administrasi

Secara konseptual, buku Ekologi Administrasi menawarkan pendekatan administrasi yang luas dengan menggunakan paradigma ekologis yang inovatif. Buku ini mencakup berbagai aspek penting, termasuk teknologi, budaya, sosial, politik, dan ekonomi, yang menjadi kekuatan utamanya dalam memahami kompleksitas administrasi publik. Melalui model yang berpusat pada interaksi timbal balik antara manusia dan lingkungannya, Dr. Sahya Anggara menunjukkan betapa pentingnya administrasi yang responsif dan adaptif terhadap kondisi lingkungan yang senantiasa berubah. Landasan teoretis yang kuat diberikan oleh bab awal yang menjelaskan dasar ekologi administrasi dan makna filosofisnya, memperkuat argumen bahwa administrasi tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik secara fisik maupun sosial. Dengan pendekatan ini, buku ini mengajak pembaca untuk mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor eksternal memengaruhi kebijakan dan praktik administrasi, serta pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan.

Bagian ini, bagaimanapun, kekurangan eksplorasi empiris untuk mendukung postulasi filosofis tersebut. Sebagai contoh, buku-buku ini sering menguraikan ide-ide tentang ekologi administrasi secara abstrak tanpa memberikan studi kasus yang spesifik, meskipun konsepnya didasarkan pada kearifan lokal dan teori utilitarianisme. Kekurangan ini dapat membuat pembaca dari kalangan praktisi merasa sulit untuk menerapkan ide-ide buku dalam situasi kehidupan nyata. Sebaliknya, hal ini lebih menarik bagi akademisi yang terbiasa dengan abstraksi teoretis.

Selain itu, buku ini menawarkan peluang yang sangat baik untuk menyelidiki administrasi modern, terutama di Indonesia. Bab utama membahas bagaimana administrasi dapat berkembang dengan memasukkan nilai-nilai lokal ke dalam sistem birokrasi modern. Ini memungkinkan pengembangan administrasi berbasis budaya, yang dapat meningkatkan efisiensi dan relevansi birokrasi lokal. Karena menawarkan desain birokrasi yang lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat, bab tentang Model Ekologi Administrasi Publik Kontemporer menjadi sangat penting. Konsep seperti birokrasi kontekstual, otonomi daerah, dan good governance menawarkan perspektif yang relevan untuk reformasi birokrasi di Indonesia. Buku ini memberikan solusi kreatif untuk mengatasi tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin meningkat.

Namun, bahaya terbesar yang dihadapi buku ini adalah kemungkinan bahwa pembaca yang berasal dari latar belakang birokrasi konservatif dapat menentangnya. Metode ekologis yang menekankan kearifan lokal dan adaptasi lingkungan dapat dianggap bertentangan dengan sistem birokrasi tradisional yang hierarkis dan otoriter. Selain itu, gagasan yang ditawarkan dalam buku ini mungkin sulit diterapkan dalam sistem birokrasi yang keras karena tidak ada instrumen praktis yang jelas.

Hubungan antara administrasi dan elemen ekologi seperti politik, sosial, ekonomi, dan budaya dibahas dalam Bab Tinjauan Ekologi Administrasi Negara. Penulis menjelaskan bahwa dinamika politik, seperti pergantian pemimpin, dan elemen sosial, seperti tingkat pendidikan masyarakat, dapat memengaruhi administrasi. Sayangnya, analisis ini seringkali hanya deskriptif dan tidak menawarkan solusi kreatif. Misalnya, ketika orang berbicara tentang birokrasi Indonesia, mereka lebih banyak berbicara tentang masalah seperti korupsi dan inefisiensi daripada memberikan solusi konkret untuk masalah tersebut.

Selain itu, strategi pengembangan ekologi administrasi publik menawarkan pendekatan yang sistematis untuk reformasi birokrasi. Penulis menunjukkan bahwa pendekatan ini melibatkan peningkatan elemen seperti kebijakan publik, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan kelembagaan. Namun, buku ini mungkin kurang mendalam dalam menjelaskan bagaimana strategi-strategi tersebut dapat digunakan dalam kehidupan nyata. Pembaca mungkin memerlukan bantuan tambahan saat menerjemahkan ide-ide di buku ini ke dalam praktik.

Dari perspektif metodologis, buku ini dapat dianggap sebagai kontribusi yang signifikan terhadap literatur administrasi publik, terutama karena fokusnya pada pendekatan ekologis. Namun, kelemahan yang menonjol dari pendekatan ini adalah bahwa tidak ada data empiris untuk mendukung argumen yang diajukan; penulis secara eksplisit menyebutkan bahwa pendekatan ini membutuhkan pengujian empiris lebih lanjut, tetapi tidak ada studi kasus atau penelitian lapangan yang disertakan dalam buku ini, membuat pembaca merasa tidak nyaman dengan pendekatan

Dalam bab penutup buku ini, disebutkan bahwa model administrasi yang berbasis lingkungan dan adaptif adalah kunci untuk membangun birokrasi yang lebih fleksibel dan fleksibel. Dalam reformasi birokrasi, perspektif baru yang berharga diberikan oleh penekanan pada elemen seperti kearifan lokal, prinsip budaya, dan inovasi dalam pelayanan publik. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa penulis tidak memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana memasukkan prinsip-prinsip ini ke dalam struktur birokrasi yang sudah ada. Pembaca mungkin menganggap buku ini lebih konseptual daripada praktis.

Pembahasan Efisiensi dan Responsivitas Birokrasi Indonesia Lewat Pendekatan Ekologis

Pendekatan ekologis dalam administrasi publik menekankan interaksi dinamis antara birokrasi dan berbagai elemen lingkungan, seperti faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dengan memahami konteks ekologis ini, birokrasi dapat beradaptasi dan merespons kebutuhan masyarakat secara lebih efektif, bertindak sebagai agen perubahan yang responsif. Menurut Adnan dan Hamim (2015), hubungan timbal balik antara sistem pemerintahan dan lingkungan sekitarnya berpengaruh signifikan terhadap kinerja administrasi negara. Ketika birokrasi mampu mengintegrasikan perspektif lokal ke dalam kebijakan dan programnya, hal ini tidak hanya meningkatkan relevansi dan efektivitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pendekatan ekologis menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan kompleks di era globalisasi dan perubahan iklim saat ini, menciptakan tata kelola yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Adnan, I. M., & Hamim, 2015).

Selain itu, penerapan e-Government sebagai bagian dari pendekatan ekologis dapat signifikan meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan aksesibilitas pelayanan publik. Dengan memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi, e-Government mempermudah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, memungkinkan proses administrasi yang lebih cepat dan transparan. Temuan dalam berbagai artikel mendukung argumen ini, menunjukkan bahwa e-Government tidak hanya mampu mempercepat penyampaian layanan tetapi juga menjangkau lebih banyak warga, terutama kelompok yang sebelumnya terpinggirkan (Saputra et al., 2018). Namun, implementasi pendekatan ekologis menghadapi tantangan, termasuk resistensi dari birokrasi tradisional yang hierarkis. Oleh karena itu, reformasi birokrasi perlu dilakukan untuk memperbaiki manajemen pegawai dan struktur organisasi agar lebih efisien dan efektif dalam pelayanan publik (Basuki Lembaga Administrasi Negara & Johanes, 2018).

Integrasi Kearifan Lokal dalam Model Ekologi Administrasi Publik

Kearifan lokal mencakup nilai-nilai, norma, dan praktik yang berkembang dalam masyarakat tertentu dan dapat menjadi dasar bagi model ekologi administrasi publik yang lebih kontekstual. Integrasi kearifan lokal dalam administrasi publik dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas kebijakan serta layanan publik. Administrasi publik yang beridentitas sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal tidak kalah hebatnya jika dibandingkan dengan administrasi publik model barat. Dengan mengakui dan memanfaatkan kearifan lokal, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang beragam. Hal ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, sehingga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Selain itu, kearifan lokal sering kali mengandung praktik-praktik berkelanjutan yang telah teruji oleh waktu, yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Ketika kearifan lokal diintegrasikan dalam kebijakan publik, hal ini dapat memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kerja sama antara pemerintah dan warga (Saputra et al., 2018).

Selain itu, model pengelolaan ekologi berbasis kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam menunjukkan bahwa kearifan lokal memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Hal ini menunjukkan potensi integrasi kearifan lokal dalam model ekologi administrasi publik (Kartodihardjo & Supriono, 2000). Namun, perlu diperhatikan bahwa integrasi kearifan lokal harus disesuaikan dengan konteks modern dan memerlukan pengujian empiris lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya. Hal ini penting agar administrasi publik yang berbasis kearifan lokal dapat diterapkan secara efektif dalam konteks pemerintahan saat ini. Penerapan kearifan lokal juga memungkinkan adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan sosial dan lingkungan, yang sering kali tidak dipertimbangkan dalam model administrasi publik yang lebih global. Dengan demikian, kearifan lokal tidak hanya menjadi sumber inspirasi, tetapi juga alat penting dalam menciptakan sistem administrasi publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi juga penting untuk mengeksplorasi dan mendokumentasikan kearifan lokal yang ada, sehingga dapat diterapkan secara lebih luas dalam kebijakan publik. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan lahir solusi inovatif yang relevan dengan konteks lokal, sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dampak Positif Implementasi Pendekatan Ekologis dalam Kualitas Pelayanan Publik

Keberhasilan implementasi pendekatan ekologis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain:

- 1) Responsivitas Kebijakan:
Kemampuan birokrasi untuk merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Menurut Adnan dan Hamim (2015), hubungan antara sistem pemerintahan dan lingkungan sekitarnya mempengaruhi responsivitas administrasi negara (Adnan, I. M., & Hamim, 2015).
- 2) Efisiensi Operasional:
Penggunaan sumber daya yang optimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penerapan e-Government dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan aksesibilitas pelayanan publik (Lase & Hulu, 2024).
- 3) Transparansi dan Akuntabilitas:
Tingkat keterbukaan dan pertanggungjawaban birokrasi dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian layanan. Reformasi birokrasi perlu dilakukan untuk memperbaiki manajemen pegawai dan struktur organisasi agar lebih efisien dan efektif dalam pelayanan publik (Basuki Lembaga Administrasi Negara & Johanes, 2018).

- 4) Partisipasi Masyarakat:
Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Administrasi publik yang beridentitas sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal dapat meningkatkan partisipasi Masyarakat (Saputra et al., 2018).
- 5) Inovasi Pelayanan:
Kemampuan birokrasi untuk mengembangkan dan menerapkan metode baru dalam pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Model pengelolaan ekologi berbasis kearifan lokal menunjukkan bahwa inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam dapat meningkatkan kualitas pelayanan public (Setyasih, 2023).

Contoh Penerapan Model Ekologis dalam Administrasi Publik

Pendekatan ekologis dalam administrasi publik menekankan interaksi dinamis antara birokrasi dan lingkungannya, termasuk faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Berikut adalah beberapa contoh penerapan model ekologis dalam administrasi publik:

- 1) Integrasi Adat dan Tradisi dalam Proses Administrasi: Di Indonesia, adat-istiadat dan tradisi memiliki peran signifikan dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, upacara pembukaan dan penutupan suatu kegiatan sering kali dianggap penting untuk legitimasi dan kelancaran pelaksanaan program pemerintah. Meskipun beberapa pandangan menganggap praktik ini dapat menghambat efisiensi, dalam konteks ekologis, penghormatan terhadap adat dan tradisi dapat meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan public (Dedeng Yoesoef Maolani et al., 2020).
- 2) Penerapan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik: Menghadapi Revolusi Industri 4.0, pemerintah Indonesia mulai mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Penggunaan e-Government, seperti sistem pelayanan terpadu berbasis daring, memungkinkan interaksi yang lebih cepat dan transparan antara pemerintah dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip model ekologis yang adaptif terhadap perubahan lingkungan teknologi.
- 3) Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat: Pendekatan ekologis juga diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam dengan melibatkan komunitas lokal. Model ini menekankan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan mereka, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal, serta meningkatkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya.
- 4) Model Keseimbangan dalam Pemerintahan Desa: Teori ekologi dapat diadopsi dalam administrasi publik dengan menganggapnya sebagai organisme yang memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Dalam konteks pemerintahan desa, model keseimbangan ini dapat diterapkan untuk memahami dan mengelola interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat setempat, sehingga tercipta harmoni dan efektivitas dalam pelaksanaan program-program desa.

Penerapan model ekologis dalam administrasi publik menuntut adaptasi terhadap konteks lokal dan perubahan lingkungan eksternal. Dengan memahami dan mengintegrasikan faktor-faktor ekologis, pemerintah dapat meningkatkan responsivitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan layanan public (Basuki Lembaga Administrasi Negara & Johannes, 2018).

4. KESIMPULAN

Dengan menerapkan pendekatan ekologis dalam administrasi publik, birokrasi Indonesia berpotensi menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini mengedepankan adaptasi terhadap kondisi lokal, penerapan teknologi modern, dan penguatan otonomi daerah yang selaras dengan karakteristik serta aspirasi masyarakat setempat. Dengan cara ini, setiap daerah dapat merancang kebijakan dan program yang lebih relevan dan tepat sasaran. Selain itu, pengintegrasian kearifan lokal ke dalam model ekologi administrasi publik dapat meningkatkan akseptabilitas dan efektivitas layanan yang diberikan. Hal ini menciptakan sinergi antara kebijakan pemerintah dan budaya lokal, sehingga menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Untuk memastikan keberhasilan penerapan metode ini, beberapa parameter kunci dapat digunakan sebagai alat ukur, seperti responsivitas kebijakan, efisiensi operasional, transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi dalam pelayanan publik. Pendekatan ekologis tidak hanya menawarkan solusi untuk tantangan birokrasi masa kini, tetapi juga menyajikan nilai-nilai lokal yang mampu menjawab kebutuhan spesifik masyarakat. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, seperti resistensi dari sistem birokrasi tradisional yang cenderung kaku dan perlunya penyesuaian terhadap konteks modern yang terus berkembang. Dengan menghadapi tantangan ini secara proaktif, Indonesia dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan dan mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif dan bertanggung jawab.

REFERENSI

- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2015). *Ekologi Administrasi Edisi Revisi*. TrussMedia.
- Anggara, S. (2018). Hukum Administrasi Negara. *Hukum Administrasi Negara*, 276.
- Anggara S. (2018). *Ekologi Administrasi Holistik, Kontemporer, dan Kontekstual*. Penerbit Pustaka Setia.
- Basuki Lembaga Administrasi Negara, J., & Johanes, I. (2018). Ekologi Administrasi Publik Di Indonesia Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0: Perspektif Kebijakan Publik. *Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 53–62. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/922>
- Bovens, M., & Zouridis, S. (2002). From street-level to system-level bureaucracies: How information and communication technology is transforming administrative discretion and constitutional control. *Public Administration Review*, 62(2), 174–184. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00168>
- Dedeng Yoesoef Maolani, Hilmi Halimatus Sya'diyah, Hilmi Safrial Hajami, & Larassita Dwi Asyifa. (2020). Analisis Model Keseimbangan Pada Pemerintahan Desa. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 18(3), 66–71. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v18i3.81>
- Kartodihardjo, H., & Supriono, A. (2000). Dampak Pembangunan Sektoral Terhadap Konversi Dan Degradasi Hutan Alam. *Center for International Forestry Research*, 26(1), 1–14. <https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201300098127>
- Lase, B. R., & Hulu, F. (2024). Model Pengelolaan Ekologi Berbasis Kearifan Lokal dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Nias. *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(6), 2485–2494.
- Loorbach, D., Frantzeskaki, N., & Avelino, F. (2017). Sustainability Transitions Research: Transforming Science and Practice for Societal Change. *Annual Review of Environment and Resources*, 42(November), 599–626. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-102014-021340>
- Meadows, D. H. (2009). *Thinking in Systems*. EarthScan. <https://doi.org/10.1016/j.aeue.2014.08.008>
- Ostrom, E. (1990). Governing the Commons. *Governing the Commons*. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511807763>
- Palijama, F. (2014). Faktor Ekologis dalam Administrasi Negara dengan Pelayanan Publik. *Populis*, 8(2), 57–63.
- Saputra, B., Suripto, S., & Chrisdiana, Y. (2018). Indigeneous Public Administration: Melihat Administrasi Publik dari Perspektif Kearifan Lokal (Local Wisdom). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15(2), 278–292. <https://doi.org/10.31113/jia.v15i2.180>
- Setyasih, E. T. (2023). Reformasi Birokrasi Dan Tantangan Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1), 48–62.
- Walker, B., Holling, C. S., Carpenter, S. R., & Kinzig, A. (2004). Resilience, adaptability and transformability in social-ecological systems. *Ecology and Society*, 9(2). <https://doi.org/10.5751/ES-00650-090205>